**MAKALAH**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

***Tentang***

**DEMOKRASI INDONESIA**

****

DISUSUN OLEH

1. ETRI KAURNILA (TIF231025)
2. TRY NURMANALAWATY (TIF231024)
3. NUR SYAMSI (TIF231023)

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS CORDOVA**

**TAHUN 2024**

# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI i](#_Toc160742931)

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc160742932)

[BAB I iii](#_Toc160742933)

[PENDAHULUAN iii](#_Toc160742934)

[1.1. Latar Belakang iii](#_Toc160742935)

[1.2. Rumusan masalah iii](#_Toc160742936)

[1.3. Tujuan iii](#_Toc160742937)

[BAB II iv](#_Toc160742938)

[PEMBAHASAN iv](#_Toc160742939)

[2.1 Sejarah Demokrasi di Indonesia iv](#_Toc160742940)

[2.2 Pengertian Demokrasi v](#_Toc160742941)

[2.3 Landasan-landasan Demokrasi Indonesia v](#_Toc160742942)

[2.4 Perkembangan Demokrasi di Indonesia vi](#_Toc160742943)

[2.5 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia vi](#_Toc160742944)

[BAB III x](#_Toc160742946)

[PENUTUP x](#_Toc160742947)

[3.1 Kesimpulan x](#_Toc160742948)

[3.2 Saran x](#_Toc160742949)

[DAFTAR PUSTAKA xi](#_Toc160742950)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat Taufik Hidayah serta Inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah dengan lancar dan tepat pada waktunya. Makalah dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini berjudul “Demokrasi Indonesia”, yaitu membahas tentang sejarah dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

            Kami menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentu hasil karya kami ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan kata. Maka dari itu dengan mengharapkan ridha Allah swt kami sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari anda semua demi untuk memperbaiki makalah kami di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat untuk semua pembaca, dan dapat digunakan didalam hal yang baik. Terima kasih.

       Taliwang, 07 Maret 2024

      Penulis

# BAB I

# PENDAHULUAN

## **Latar Belakang**

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia.Bangsa Indonesia dengan segala keanekaragamanya merupakn suatu ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita memiliki idologi dan dasar hukum yang sama,tujuan yang sama dan jiwa yang sama,semuanya terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

## **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah sejarah demokrasi di Indonesia ?
2. Apa yang dimaksud dengan demokrasi ?
3. Apa saja yang menjadi landasan-landasan demokrasi indonesia
4. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia ?
5. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?

## **Tujuan**

1. Untuk mengetahui sejarah demokrasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan demokrasi
3. UntuK mengetahui landasan-landasan demokrasi indonesia
4. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia
5. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia
6. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

# BAB II

# PEMBAHASAN

## **Sejarah Demokrasi di Indonesia**

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

       Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

## **Pengertian Demokrasi**

        Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos/kratein yang berarti kekuatan/ pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menyebut demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan ada ditangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **Landasan-landasan Demokrasi Indonesia**

**·    Pembukaan UUD 1945**

a.  Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

b.  Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c.  Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.

d. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.

**·      Batang Tubuh UUD 1945**

a.    Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.

b.    Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c.    Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

d.    Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.

e.    Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.

f.    Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

## **Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan  pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Seperti meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi.

Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi.

Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.

## **Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia**

## Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu:

**a.**   **Demokrasi Parlementer (liberal)**

Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada bertakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.

**b.**   **Demokrasi Terpimpin**

     Lahirnya demokrasi terpimpin karena ada keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain;

* 1. Demokrasi terpimpin bukanlah dictator
  2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan

kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial

* 1. Inti dari pada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

* 1. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indoesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-riilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislativ sebagai patner dan pengontrol eksekutiI serta situasi sosial poltik yang tidak menentu saat itu.

**c.  Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru**

Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menye-lesaian masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Munculnya demokrsi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrsi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai peyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil
2. Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota  PNS Departemen Kehakiman
4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
6. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR

**d.  Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi**

      Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru.  Pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :

1. Pemilihan umum lebih demokratis
2. Partai politik lebih mandiri
3. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
4. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

      Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemeritah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakandengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

# BAB III

# PENUTUP

## **Kesimpulan**

      Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos/kratein yang berarti kekuatan/ pemerin-tahan.

Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan  pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang menjadi landasan demokrasi Indonesia yaitu; Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945.

## **Saran**

Bahwa tidak sedikit para anggota parlemen yang “melupakan” rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi “empuk”. Mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka masing-masing, mengutamakan kepentingan golongan, dan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal mereka ketika kampanye. Fenomena ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa Indonesia. Para elite politik saat ini, sudah tidak lagi pada bingkai kesatuan, akan tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang melingkarinya. Seperti misalnya, adanya sengketa hasil pemilu, black campaign ketika kampanye dan sebagainya, yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun telah luntur dalam dirinya. Untuk itu, diharapkan agar masyarakat ikut mengontrol jalannya pemerintahan agar menuju Indonesia yang lebih baik.

# DAFTAR PUSTAKA

Huda, Ni’matu Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005

Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Prof Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003

Sareb Putra, R.Masri (ed), Etika dan Tertib Warga Negara, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, Pancasila dan Kewarganegaraan,Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005

Http:\pkb\materi\Demokrasi Di Indonesia dan Sejarahnya \_ Koran Demokrasi Indonesia.mht

Http:\\pkb\materi\Proses Demokrasi di Indonesia « Jendela Dunia.mht